



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ringroad Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur

Telepon (0351) 464242, Fax (0351) 466437

e-mail: dinkes.madiunkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.103/ /2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun memerlukan rencana kerja untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada isu permasalahan dalam mewujudkan Wilayah Bebas korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani dalam lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan produk hukum daerah

5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan perwal Nomor 32 tahun 2014 tentang Rood Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN.**

PERTAMA : Membuat Rencana Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan Rencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini bertujuan:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pegawai mulai dari level pimpinan sampai dengan staf dalam melaksanakan reformasi birokrasi
2. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja
3. Meningkatkan penggunaan Teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan
4. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
5. Meningkatkan kinerja instansi
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
7. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 30 April 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB
KOTA MADIUN**



dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630106 198903 2 007

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
NOMOR : 701-401.103/...../2019
TANGGAL : APRIL 2019**

**RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

NO	AREA PERUBAHAN	ISU PERMASALAHAN STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES
1	Manajemen Perubahan	Belum ada Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan dan KB	Pembentukan rencana perubahan Dinas Kesehatan dan KB							
2	Penataan Peraturan-undangan	Belum semua aturan dilaksanakan dengan mudah	Upload semua peraturan terkait Dinkes KB yg msh berlaku di Web Dinkes KB							
3	Penataan Tataaksana	Proses Bisnis harus menyesuaikan dengan Visi Misi Walikota	Penyusunan Proses Bisnis menyesuaikan dengan Visi Misi Walikota							
4	Penataan Kelembagaan	Penataan kelembagaan sudah dilaksanakan namun belum optimal	Pelaksanaan Evaluasi kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku							

5	Penataan SDM Aparatur	Peningkatan ketrampilan dan keahlian pegawai masih belum optimal dilaksanakan	Menyusun jenis pelatihan yang diperlukan untuk seluruh pegawai							
6	Penguatan Akuntabilitas	Pemantauan capaian kinerja blm dilakukan secara rutin	Monev Pemantauan capaian kinerja ditingkatkan							
7	Peningkatan pengawasan	Belum semua pegawai paham tentang Wilayah Bebas Korupsi	Sosialisasi tentang Wilayah Bebas Korupsi							
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum ada sosialisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai	Sosialisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai							

MADIUN, ³⁰ APRIL 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.Mkes
 Pembina Utama Muda



NIP. 19630106 198903 2 007